

TAJUK RENCANA

Tuntaskan Vaksinasi, Genjot 3 T

KAMIS 7 Oktober 2021 hari ini bertepatan dengan HUT ke-265 Kota Yogyakarta. Hari bersejarah yang tak cukup hanya diperingati secara seremonial, melainkan lebih dari itu, mengisi dengan aktivitas yang lebih bermakna dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kota Yogyakarta harus memenangkan pertempuran melawan pandemi Covid-19.

Kita memberi apresiasi yang tinggi atas tekad Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjadikan hari ini sebagai momentum bersejarah untuk menuntaskan vaksinasi bagi seluruh warga Kota Yogyakarta. Inilah deklarasi tuntas vaksinasi Covid-19 yang pertama di Indonesia, yang diharapkan menginspirasi daerah lain di Tanah Air.

Deklarasi tuntas vaksin Covid-19 di Kota Yogyakarta, tentu tak cukup dimaknai sebagai proses seremonial, tapi jauh lebih dalam karena mengandung makna substantif. Deklarasi itu didasarkan pada data di lapangan bahwa penduduk di Kota Yogyakarta seratus persen telah divaksin, kecuali yang secara medis memang belum diizinkan.

Deklarasi tuntas vaksin Covid-19 juga punya makna penting dalam konteks pencapaian herd immunity atau kekebalan komunal. Kita yakin dengan penuntasan vaksinasi ini maka akan diiringi dengan pencapaian herd immunity. Artinya, masyarakat akan lebih banyak terlindungi dari penularan virus Covid-19.

Dengan penuntasan vaksinasi Covid-19 dan pencapaian herd immunity, tentu tidak diartikan bahwa masyarakat sudah bebas beraktivitas apa saja tanpa mengindahkan protokol kesehatan (prokes). Diakui, prokes adalah kunci dari keberhasilan

an pengendalian Covid-19. Jadi, meskipun vaksinasi tuntas 100 persen, penegakan prokes tetap harus dilakukan, meski relatif ada kelonggaran masyarakat dalam beraktivitas.

Sementara pascapenuntasan vaksinasi Covid-19, pemerintah Kota Yoga lebih fokus pada kegiatan tracing, testing dan treatment atau dikenal dengan istilah 3 T, ini harus digenjot. Kita sangat yakin, melalui sinergi antara pemerintah Kota Yoga dengan masyarakat, Covid-19 dapat dikendalikan dan kekhawatiran bakal muncul gelombang ketiga Covid-19 seperti di beberapa negara tetangga, tidak terjadi.

Lebih dari itu, kita berharap Kota Yoga bisa menjadi model dalam penanganan Covid-19, sehingga bisa dicontoh daerah lain. Metode sweeping, yakni mencari orang yang belum divaksin hingga ke kampung-kampung, adalah aksi nyata yang menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam memberantas Covid-19. Kiranya cara ini sangat efektif dan bisa menjadi model upaya preventif pengendalian Covid-19.

Kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 sirna dari muka bumi ini, namun kita harus menunjukkan kesungguhan untuk melawannya. Paling tidak, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Yoga dan masyarakatnya adalah bentuk ikhtiar untuk memerangi Covid-19. Menuntaskan vaksinasi Covid-19 adalah kado terindah bagi Kota Yogyakarta dalam memperingati ulang tahunnya ke-265. Kita optimis, dengan penuntasan vaksinasi Covid-19, Kota Yogyakarta akan memenangkan pertempuran melawan Covid-19. Dirgahayu Kota Yogyakarta! □

Stunting dan Kemiskinan di DIY

Anif Muchlashin

melalui pemantauan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Pada penanganan ini orang tua balita berperan penting dalam pemantauan balita dari lingkup keluarga. Pada fase emas, para orang tua dibantu oleh tenaga kesehatan yang disebut dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam pola asuhnya. Meskipun demikian

serta kelurahan dan kalurahan secara konvergen yaitu memastikan kelompok sasaran mendapatkan pelayanan yang baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan tersedianya layanan kesehatan Ibu dan anak, konseling gizi terpadu yang dapat diwujudkan dengan kegiatan posyandu, tersedianya sarana air bersih dan sanitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta kesehatan, pemberian pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kelas pengasuhan, pemeriksaan kesehatan pasangan usia subur serta pemberian tablet tambahan darah pada remaja puteri. Sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu pada keluarga yang memiliki balita. Akses dan keterjangkauan orangtua balita terhadap fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan untuk menekan angka stunting di DIY.

Stunting merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan karena hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak pada generasi yang akan datang. Keterlibatan pemerintah kalurahan (pedesaan) terutama sangat penting keberadaannya. Karena sampai pada tahun 2021 angka kemiskinan di DIY masih banyak berada di pedesaan yakni pada angka 14,44% dari total 12,80% per Maret 2021. □

*) *Anif Muchlashin, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Bappeda-DIY*



KR-JOKO SANTOSO

pengetahuan terhadap pola asuh dan gizi balita sangat penting dimiliki orang tua dalam mengentaskan stunting di DIY. Sehingga dari sisi pengetahuan mengenai pola asuh dan asupan gizi anak sangat ditekankan untuk menghindarkan stunting pada balita.

Stunting merupakan masalah besar yang tidak dapat disepelekan. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu agenda penting pemerintah saat ini. Hal ini dapat dilihat dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang salah satu peruntukannya adalah untuk pencegahan stunting dengan tageline-nya mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Perlu Keterlibatan

Selain itu ada juga pelaksanaan pencegahan stunting melalui peran

6 Terendah

Posisi stunting DIY berada di 6 terendah nasional yakni berada di angka 21,04%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang cukup baik dan berhasil menangani stunting di DIY, meskipun masih lebih 1,04% jika menggunakan standar WHO.

Ada dua cara dalam menangani stunting. Pertama, dimulai dari keluarga yakni fokus pada pengasuhan anak

Muhammadiyah dan Dirjen Haji

Benni Setiawan

SEJARAH mencatat Muhammadiyah menjadi organisasi yang membidani lahirnya Direktorat Urusan Haji. Saat itu Muhammadiyah mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH M Sudja'. Bagian Penolong Haji menjadi rintisan Direktorat Urusan Haji.

Pada Kongres Tahunan (Sekarang Mukhtamar) di Minangkabau, Sumatera Barat 1930, Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia. Sejarah panjang ini menunjukkan secara gamblang betapa Muhammadiyah lekat dengan urusan haji dan menjadi inisiator lahirnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Dirjen PHU merupakan kursi panas. Artinya, banyak agenda keumatan di bagian ini. Penyelenggaraan Haji dan Umrah punya banyak pekerjaan rumah untuk dirampungkan. Salah satunya adalah penataan kuota haji yang semakin panjang dari tahun ke tahun. Selain itu PR besar Dirjen PHU adalah maraknya kasus penipuan umrah oleh beberapa biro nakal.

Inisiator

Berbagai persoalan di atas perlu diselesaikan dengan berbagai cara dan langkah taktis. Muhammadiyah terampil untuk berkontribusi dalam mengurai masalah di Dirjen Haji. Selain karena Muhammadiyah menjadi inisiator juga telah menjadi kerja PERSYARIKATAN untuk membantu pemerintah.

Profesor Hilman Latief, kader Muhammadiyah yang baru saja dilantik menjadi Dirjen PHU pada 1

Oktober 2021 lalu, perlu bekerja cepat, tepat, dan trengginas untuk memperpendek daftar tunggu haji setelah dua tahun terakhir pemerintah memutuskan untuk tidak membebankan haji asal Indonesia. Penundaan pemberangkatan itu tentu berefek pada semakin panjangnya daftar antrean calon haji Indonesia. Penataan dan manajemen haji perlu dikelola dengan baik agar umat Muslim tidak merasa dirugikan karena sebuah kebijakan.

Selain daftar panjang antrean jamaah haji. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mempunyai tantangan tidak ringan yaitu penataan biro umrah nakal. Kasus First Travel, Abu Tour, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Hannien Tour, semoga tidak terjadi lagi.

'Iming-iming'

Munculnya biro nakal dengan berbagai iming-iming memudahkan untuk berangkat ke tanah suci pun menunjukkan harapan besar masyarakat tentang tata kelola kelembagaan haji dan umrah yang baik, transparan, dan bertanggungjawab. Masyarakat menginginkan Kementerian Agama mampu menjadi pemimpin dan pemandu gerak langkah yang ajeg, simultan, dan sesuai dengan koridor hukum. Pembenahan tata kelola kelembagaan menjadi kunci penting di tengah disrupsi/sorotan ta-

jam direktorat ini. Keterbukaan/transparansi kinerja kepada publik menjadi pintu masuk perubahan dalam tata kelola.

Bersinergi dengan berbagai kekuatan bangsa dalam mengurai problem di atas dapat dilakukan. Organisasi massa Islam, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga swasta, dan lainnya perlu diajak berembung mengurai masalah ini. Masalah ini perlu solusi multidisiplin bahkan transdisiplin, sehingga mengajak semua kekuatan untuk berkolaborasi menjadi sebuah keniscayaan. □

*) *Benni Setiawan, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Anggota Majelis Pendidikan Kader (MPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.*

Pojok KR

Perusahaan rintisan DIY miliki potensi besar.
-- Pengembangan ekonomi digital jadi prioritas. ***

Percepatan vaksinasi mahasiswa, Pemda libatkan PT.
-- Mestinya kesadarannya lebih tinggi. ***

Kasus menurun, Dinkes Sleman efisienkan isoter.
-- Namun tetap antisipasi.

Berabs

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Model Pembelajaran 'Blended Learning'

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dilonggarkan bagi daerah yang mengalami penurunan kasus Covid-19. Kelonggaran ini diberikan kepada daerah yang berada pada level dua dan tiga. Masyarakat yang masuk level dua dan tiga harusnya bersyukur karena diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Masyarakat banyak yang setuju dimulainya pembelajaran tatap muka, karena pembelajaran tatap muka merupakan cara untuk membangun karakter siswa. Ada pola komunikasi membangun tata krama antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Selama pandemi Covid-19, pembelajaran dilaksanakan secara virtual atau daring sehingga pendidikan karakter siswa terabaikan karena guru terlalu fokus pada penuntasan kurikulum.

Pembelajaran tatap muka diizinkan oleh pemerintah, tentu saja pembelajaran tatap muka dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Sekolah yang sudah bisa menerapkan pembelajaran tatap muka agar tetap mematuhi aturan dan petunjuk yang ada, khususnya yang menyangkut sarana prasarana prokes, standar operasional prosedur, hingga pemetaan penyakit dan keadaan seluruh warga sekolah. Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka jangan lengah dan ja-

ngan merasa bebas dari ancaman Covid-19.

Sekolah yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka harus sudah mempersiapkan diri dan mendapatkan izin dari pemerintah. Dengan diizinkan pembelajaran tatap muka ini, jangan sampai muncul klaster baru di lingkungan sekolah. Untuk menjaga hal tersebut, sekolah dapat menerapkan pola pembelajaran kombinasi blended learning selama pembelajaran tatap muka terbatas.

Model pembelajaran blended learning merupakan gabungan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Blended learning merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditemukan komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat. Keuntungan dari penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau tatap muka dan pengajaran online adalah adanya interaksi sosial antara guru dan siswa.

Blended learning memberikan kesempatan terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. □

*) *Suprpt, Kepala SDN Potrojoyan 3 Prambanan, Sleman.*

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mubassahda. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaraga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.